



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNTUR IMAN NEFIANTO
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
3. NHK : 62839

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.343.414.560

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 256.500.000
2. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 163.370.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 120.603.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/34 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 687.851.560
6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.971.090.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.990.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 859.381.501**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.224.786.061



III. HUTANG

Rp. 967.033.310

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.257.752.751

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.